



Judul : Soal Rencana Pencabutan Subsidi Listrik - DPR: Jika Alasan PLN Tak Masuk Akal, Kami Tolak
Tanggal : Minggu, 11 September 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Rencana Pencabutan Subsidi Listrik

DPR: Jika Alasan PLN Tak Masuk Akal, Kami Tolak

DPR berjanji tidak akan serta merta menyetujui keinginan PLN untuk menghapus subsidi listrik bagi pelanggan golongan daya 900 watt. Jika alasan yang diajukan PLN tidak masuk akal, DPR akan tegas menolak rencana itu.

PADA Jumat kemarin lusa, Dirut PLN Sofyan Basir begitu optimistis rencana pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan golongan daya 900 watt akan bisa dilakukan mulai 2017. Sofyan mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Komisi VII DPR terkait rencana pencabutan subsidi itu. Alasannya, pelanggan golongan tersebut bukan lagi keluarga miskin dan rentan miskin. Dari hasil komunikasi itu, Komisi VII akan membawa rencana tersebut dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Sudah disampaikan ke DPR. Mudah-mudahan subsidi buat 2017 sudah selesai,” ucap

Sofyan di Kantor Kementerian BUMN.

Namun, pernyataan Sofyan ini dibantah anggota Komisi VII Inas N Zubir. Politisi Hanura ini mengakui, pencabutan subsidi bagi pelanggan daya 900 watt memang masuk dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah kepada DPR. Namun, DPR belum melakukan persetujuan. Sebelum DPR memberikan persetujuan, pencabutan subsidi itu tidak bisa dilakukan.

“Dalam rapat sebelumnya, kami sepakat bahwa kenaikan TDL (tarif dasar listrik) harus mendapat persetujuan DPR. Nah, untuk rencana kenaikan

tarif 900 watt ini, kami belum punya kesepakatan,” ucapnya, kemarin.

Pekan depan, sambung dia, Komisi VII DPR akan menggelar rapat dengan Dirut PLN untuk membahas persoalan tersebut. Dalam rapat itu, Komisi VII akan menguliti PLN mengenai rencana pencabutan subsidi itu.

“Mereka (PLN) mengusulkan sebanyak 18,7 juta pelanggan 900 watt, subsidinya dicabut. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu dan miskin, sebanyak 4,1 juta orang tetap dapat subsidi. Ini harus dibahas dulu. Kalau penjelasannya nggak masuk akal, ya kami tolak,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad bersuara lebih tegas. Kata politisi Golkar itu, tanpa melakukan pembahasan, sikap DPR sudah jelas, yaitu menolak

rencana tersebut. Sebab, pencabutan subsidi tersebut jelas akan menyusahkan rakyat kecil. Padahal, kondisi ekonomi saat ini sedang sulit.

“Jika subsidi listrik dicabut, itu pasti akan menambah berat beban masyarakat. Prinsip kami, jangan ada kenaikan harga. Rakyat kecil sudah susah, jangan ditambah susah,” tegasnya.

Namun, sikap PLN itu seperti sudah sangat mantap. Apalagi, pemerintah juga memberi dukungan untuk pencabutan subsidi terhadap pelanggan golongan daya 900 watt.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, pihaknya bersama-sama PLN akan datang ke DPR untuk mengusulkan pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 watt. Alasannya, jika pelanggan tersebut masih disubsidi, dipastikan anggaran subsidi listrik untuk 2017 tidak

akan cukup.

“Kami ada rencana mengusulkan ke DPR untuk pencabutan subsidi bagi golongan subsidi 900 watt bagi yang mampu. Kan diperkirakan 22,9 juta totalnya. Yang berhak sesuai perhitungan kami 4,1 juta,” ucapnya,

Dengan pencabutan subsidi itu, lanjutnya, akan didapat penghematan anggaran sebesar Rp 20 triliun.

“Bisa sampai Rp 20 triliun lebih, total semua selama satu tahun. Penghematannya bisa segitu,” ucapnya, yakin.

Rencana pemerintah dan PLN untuk menghapus subsidi ini merujuk pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dari hasil survei TNP2K ditemukan, 18,7 juta pelanggan golongan 900 watt tidak layak disubsidi karena masuk keluarga mampu. Yang benar-benar miskin hanya 4,3 juta pelanggan. ■ ONI